

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Pelaksanaan pengelolaan kawawan wisata Lembah Harau dilaksanakan oleh beberapa unsur yakni Pemerintah Daerah yang diwakili oleh Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota, Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Barat, pihak swasta yang mana disini adalah Harau Sky dan Pokdarwis Lembah Harau. Adapun tujuan dari pengelolaan ini yaitu agar terwujudnya Lembah Harau sebagai wisata yang menarik dan mampu bersaing di kancan yang lebih luas sehingga meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke Lembah Harau. Selain itu juga untuk meningkatkan kemampuan SDM dalam mengelola potensi yang dimiliki kawasan wisata Lembah Harau. Jika potensi yang dimiliki dapat dikelola dengan baik maka akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat terutama yang berada disekitar kawasan wisata Lembah Harau.

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai kolaborasi dalam pengelolaan kawasan wisata Lembah Harau Kabupaten Lima Puluh Kota, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa kemajuan dan peningkatan jumlah kunjungan wisata dari tahun ke tahun berdasarkan data yang sudah di dapat oleh peneliti merupakan implikasi dari pengelolaan kawasan wisata Lembah Harau yang sudah tergolong cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya pertumbuhan *homestay* di sekitar kawasan wisata Lembah Harau, selain itu kawasan Harau juga termasuk kedalam Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan teori *collaborative governance* yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash, pelaksanaan pengelolaan kawasan wisata Lembah Harau belum sampai ke level *collaborative governance* sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash karena masih adanya beberapa indikator penting yang belum terpenuhi. Hal ini ditandai dengan belum adanya aturan dasar yang jelas untuk mengikat keseluruhan *stakeholder* dalam berkolaborasi. Kemudian pada indikator kepemimpinan fasilitatif, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai *leading sector* belum memfasilitasi dialog antar *stakeholder* yang terlibat serta belum menetapkan kebijakan yang jelas dalam pengelolaan kawasan wisata Lembah Harau. Pada indikator proses kolaborasi, belum terdapat dialog tatap muka yang dilakukan antar semua *stakeholder* yang terlibat dalam kolaborasi. Selain itu, komitmen pokdarwis dalam pengelolaan kawasan Lembah Harau ini masih sangat lemah, ditandai dengan pokdarwis yang belum menunjukkan peran yang optimal dalam berkolaborasi. Dapat disimpulkan pengelolaan kawasan wisata Lembah Harau berdasarkan teori Ansell & Gash belum termasuk dalam konsep *collaborative governance*.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, saran yang diberikan peneliti terkait dengan *Collaborative Governance* dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Lembah Harau Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebagai berikut:

1. Disarankan kepada pemerintah daerah Kabupaten Lima Puluh Kota agar dalam pengelolaan kawasan wisata Lembah Harau menerapkan konsep

collaborative governance agar pengelolaan dapat lebih optimal dan terstruktur.

2. Diharapkan adanya forum yang dapat mempertemukan seluruh *stakeholder* terlibat agar kendala dapat disampaikan dan diketahui secara bersama-sama dan dapat melakukan evaluasi secara bersama.
3. Untuk Pokdarwis diharapkan memberikan peran yang optimal dalam berkolaborasi agar pemberdayaan masyarakat dapat berjalan dengan baik dan maksimal dan dapat meningkatkan kualitas SDM yang ada di Lembah Harau.
4. Diharapkan masyarakat dapat memahami potensi yang dimiliki Lembah Harau agar masyarakat dapat saling bekerja sama dalam memanfaatkan potensi yang ada.

